

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional terbagi menjadi beberapa tujuan dan sasaran. Salah satu bukti keberhasilan dalam pembangunan adalah pengendalian masalah kemiskinan, selain itu terdapat beberapa tujuan lain misalnya meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat terciptanya lapangan pekerjaan, serta terciptanya kesejahteraan penduduk. Indonesia sampai saat ini masih memiliki permasalahan tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok sehingga penanganannya harus lebih serius. Kemiskinan sendiri pada dasarnya tidak hanya dihadapi oleh negara Indonesia tetapi seluruh negara di dunia.

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin seperti yang sudah dijelaskan diatas yang bisa dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja dari penduduk itu sendiri Megawati et al., (2018) Tahun 2018 BPS mencatat 73,65 ribu jiwa penduduk yang terdapat pada garis kemiskinan, angka tersebut berkurang pada tahun sebelumnya sebesar 4,14% atau 7,22 ribu jiwa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan ini dapat diapresiasi, maka pemerintah beserta masyarakat perlu bersama-sama membangun usaha yang lebih besar untuk mengangkat dari garis kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa : 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap kesejahteraan)-Nya. Oleh*

*sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunannya yang lemah setelah kita tidak ada, baik lemah secara moral maupun secara materi. Maka pemerintah berupaya untuk selalu menerapkan kebijakan demi meningkatkan ekonomi rakyat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Segala perbuatan kita di dunia baik atau buruknya Allah SWT akan selalu menyaksikan walaupun manusia tidak mengetahuinya, maka berbuat baiklah sesama manusia dan bertakwalah hanya kepada Allah SWT, hal tersebut tercermin dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah SWT mengajarkan anjuran moral untuk saling berbuat baik dan membiasakan diri untuk hidup lebih teratur serta tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, lebih baik uang tersebut dibelanjakan atau di investasikan untuk bekal hidup didunia dalam jangka panjang, karena dalam agama islam semua jenis kegiatan jika seseorang berniat untuk menjadikannya ibadah dan akan bernilai seperti kegiatan investasi ini.

Tingkat kemiskinan pada enam tahun terakhir pada provinisi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi di mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berikut table persentase penduduk miskin menurut provinsi di wilayah Jawa sebagai berikut:

**Tabel 1**

Table 1. 1 **Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2015-2020**

Provinsi	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	7,54	7,5	7,55	7,12	6,89	9,22
Jawa Barat	19,1	17,72	16,54	14,7	13,73	16,31
Banten	11,65	10,78	11,04	10,49	10,03	12,55
Jawa Tengah	26,9	26,46	25,24	22,51	21,38	23,25
Jawa Timur	24,62	23,9	22,97	21,83	20,57	22,55
DIYogyakarta	28,07	26,44	25,38	23,94	23,14	25,08

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020-2021*

Berdasarkan tabel diatas, dari semua Provinsi, Jawa Tengah menduduki persentase jumlah penduduk miskin terbanyak peringkat ke-2 setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk 23,25% pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 22,55%, lalu disusul pada peringkat ke-4 yaitu Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 16,31% dan Provinsi Banten sebesar 12,55%. Sedangkan Provinsi dengan penduduk miskin paling rendah yaitu DKI Jakarta dengan persentase 9,22%. Secara keseluruhan, selama periode 2015 sampai dengan 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi, dimulai tahun 2015 sampai dengan 2020 persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Eks karesidenan Semarang telah melakukan upaya untuk menanggulangi penduduk miskin yang dibagi menjadi kelompok besar yaitu masyarakat tidak mampu dalam usia produktif dan warga lanjut usia (lansia). Bagi kelompok lansia program tersebut akan didampingi oleh program amal atau bakti sosial dengan cara merenovasi rumah, pemberian santunan atau tali kasih kepada janda-janda tua, dan memberikan bantuan sosial seperti BNPT, PKH, KKS. Bagi kelompok masyarakat tidak mampu dalam usia produktif akan diberikan pelatihan-pelatihan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang dan bisa menghidupi keluarganya secara lebih baik. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan waktu tidak bisa langsung harus bertahap, sasarannya pun harus pasti tidak bisa mengada-ada oleh karena itu pemerintah akan terus berbenah agar tidak tercecer pada

programnya, terbukti penduduk miskin berangsur-angsur menurun datanya pada daerah eks karesidenan semarang. Bagi yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah akan terus memberdayakan lingkungan sekitarnya dengan cara memantau dan terus mendampingi.

Berdasarkan table 1 Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam peringkat nomor 2 dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa yang dimana eks karesidenan yang meliputi kabupaten/kota antara lain kota Semarang, Semarang, kota Salatiga, Kendal, Demak, dan Grobogan. Di Kabupaten/Kota tersebut selama periode 2015 sampai dengan 2020 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel**  
**Table 1. 2Penduduk Miskin Menurut Eks-Karesidenan Semarang**  
**Tahun 2015-2020**

Wilayah	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Semarang	84,27	83,60	80,90	73,65	71,97	79,58
Semarang	81,25	80,70	79,70	75,67	73,90	79,88
Kota Salatiga	10,62	9,70	9,60	9,24	9,21	9,69
Kendal	109,27	107,80	106,10	94,70	91,20	97,49
Demak	160,89	158,80	152,60	144,12	137,60	146,87
Grobogan	184,49	184,10	181,00	168,70	161,92	172,26

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2021*

Berdasarkan table 2 jumlah penduduk miskin di eks-karesidenan Semarang pada periode 2015-2020 cukup mengalami fluktuasi. Dari seluruh wilayah di eks-karesidenan Semarang, wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada periode dimulai tahun 2015-2020 adalah

wilayah Grobogan dengan jumlah penduduk miskin sebesar antara 161,92-184,49 ribu jiwa, kemudian diikuti wilayah Demak dengan penduduk miskin sebesar antara 137,60-160,89 ribu jiwa, wilayah Kendal menduduki urutan ketiga dengan penduduk miskin sebesar antara 91,20-109,27 ribu jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah yakni Kota Salatiga dengan jumlah penduduk miskin sebesar antara 9,21-10,62 ribu jiwa.

Menurut Wahyu Azizah et al., (2018) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Jumlah penduduk sendiri terbagi antara wilayah atau daerah yang akan terus bertambah setiap tahunnya tergantung pada angka kelahiran. Jika jumlah penduduk dalam wilayah tersebut terus mengalami kenaikan dan tidak bisa dikendalikan dapat menjadi pemicu masalah bagi pemerintah daerah karena akan berpengaruh pada angka kemiskinan juga yang akan bertambah. Tetapi pertumbuhan penduduk justru dapat mengurangi angka kemiskinan bila penduduk tersebut mampu mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya maupun keluarganya. Upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran di nilai masih belum cukup berhasil dengan memenuhi lapangan pekerjaan bagi masyarakat bila penduduk terus meningkat. Hal tersebut bisa saja terjadi pada tiap wilayah karena mempunyai pertumbuhan pembangunan yang berbeda-beda, terdapat wilayah yang dapat mencapai pertumbuhan cepat adapula wilayah yang mencapai pertumbuhan lebih lambat. Selain hal tersebut kekayaan yang dimiliki dan sarana prasarana wilayah seperti sarana perhubungan atau transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain dapat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pembangunan pada wilayah tersebut.

Menurut Aziz et al., (2016) selain jumlah penduduk miskin terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan merupakan hal penting yang tidak bisa disepelekan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin

tinggi produktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa. Seseorang yang berpendidikan tinggi mempunyai gagasan yang baik dalam memproduksi barang ataupun jasa, bila gagasan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maka semua orang mampu menggunakan gagasan tersebut sebagai manfaat dari pendidikan. Sebagian orang setuju bahwa pendidikan merupakan aset untuk pembangunan masa depan, karena pendidikan berkaitan dengan pembangunan karakter atau kualitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Jacobus et al., (2019) terdapat faktor yang lainnya selain jumlah penduduk dan pendidikan yaitu tingkat Kesehatan. Kesehatan merupakan standar hidup minimal yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Karena dengan masyarakat mendapatkan fasilitas Kesehatan dengan baik, akan meningkatkan produktivitas masyarakat oleh karena itu akan meningkatkan kesejahteraan seiring dengan perbaikan Kesehatan di masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dimana kondisi Kesehatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia maka keduanya harus seimbang sesuai dengan porsinya. Pembangunan Kesehatan adalah sebuah proses perubahan terhadap tingkat Kesehatan sekelompok masyarakat atau penduduk dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar Kesehatan yang ada. Maka pembangunan Kesehatan adalah pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

Menurut (Yacoub, 2012) faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran dimana pengangguran yang tercapai dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Semakin turun tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah kemiskinan. Pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan mengakibatkan menurunnya tingkat

kesejahteraan. Bila tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut turun akan memunculkan masalah yang lainnya yaitu kemiskinan yang akan terus bertambah.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Pada periode pemerintah yang telah mengeluarkan banyak anggaran untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia justru malah meningkat pada tiap tahunnya. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa pengeluaran pemerintah yang dijadikan program untuk menyelamatkan kemiskinan di Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan itu sendiri. Belanja pemerintah guna mengentaskan kemiskinan yang terus bertambah bukan menjadi ukuran terbaik untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut Kemiskinan & Indonesia, (2017).

Faktor yang berikutnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia, dimana IPM menjadi alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan pada suatu wilayah atau daerah yang mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Maka dapat diharapkan wilayah tersebut memiliki nilai IPM yang tinggi biasa hal tersebut diikuti dengan kualitas hidup masyarakat yang juga tinggi, bila nilai IPM pada wilayah tersebut tinggi seharusnya tingkat kemiskinan rendah. Terdapat empat komponen dalam IPM yaitu bidang Kesehatan yang dapat diukur melalui angka harapan hidup, bidang Pendidikan yang dapat dilihat melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, rata-rata besarnya pengeluaran perkapita untuk menilai kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari pendekatan pendapatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pengembangan hidup yang layak (Rah Adi Fahmi et al., 2018).

Menurut Akbar & Hayati, (2021) jumlah penduduk miskin sejatinya akan terus bertambah bila tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah. Pulau Jawa adalah Pulau terpadat di Indonesia

dan akan menjadi wilayah yang paling sulit untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Pulau Jawa juga merupakan Pulau dengan jumlah penduduk miskin terbesar sehingga pemerintah dari setiap provinsi harus secepatnya mencari solusi dan upaya guna menanggulangi masalah kemiskinan agar tidak semakin parah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Jawa Tengah (2019) upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah program yang dibuat dengan serius, bahkan bisa menjadi salah satu program utama. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi focus pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, yang pertama yaitu pada bidang pertanian dengan cara melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan Desa Berdikari yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan ataupun masyarakat sekitar dengan bantuan dana oleh pemerintah desa pada desa binaan. Berikutnya poin kedua yaitu pada bidang ekonomi menjadi wilayah tersebut menjadi lebih produktif dengan cara melaksanakan yang dibentuk oleh kelompok bukan merupakan kegiatan simpan pinjam lebih diarahkan pada pola kegiatan seperti berikut:

- 1) Pemerintah berkomitmen dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdikari atau mandiri.
- 2) Masyarakat diminta lebih bisa membangun lingkungan yang sehat atau gotong royong perlu digalakan kembali.
- 3) Pemerintah melakukan pemetaan kemiskinan dan pengangguran guna penanganan yang maksimal di desa.
- 4) Memberikan pembekalan keterampilan, permodalan, dan pendampingan usaha pada kelompok miskin usia produktif agar masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya pada setiap harinya.

- 5) Memberikan bimbingan pada masyarakat seputar pemasaran hasil usaha ekonomi produktif.
- 6) Pembangunan infrastruktur guna kelancaran arus distribusi barang maupun jasa pada desa.
- 7) Pengembangan usaha ekonomi produktif pada desa yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- 8) Memberikan pendampingan pada usaha masyarakat secara nyata misalnya pemberdayaan pekarangan, usaha perikanan, posyandu dan lain sebagainya.

Kegiatan diatas dianggap mampu dilaksanakan sebelum dilakukannya pembahasan program atau kegiatan masing-masing SKPD (Surat Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Tengah sehingga kegiatan yang dapat dialokasikan diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Ketimpangan Pendapatan, UMK, dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020.
2. Bagaimana Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020.

3. Bagaimana Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020.
4. Bagaimana UMK berpengaruh terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020.
5. Bagaimana Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Semarang Tahun 2015-2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap perubahan Kemiskinan.
2. Menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap perubahan Kemiskinan.
3. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap perubahan Kemiskinan.
4. Menganalisis pengaruh UMK terhadap perubahan Kemiskinan.
5. Menganalisis pengaruh Kesempatan Kerja terhadap perubahan Kemiskinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu:

1. Bidang Teoritis/Akademis

Secara Teoritis/Akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi terutama mengenai sektor moneter. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan tambahan literatur mengenai Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Ketimpangan Pendapatan, UMK, dan Kesempatan Kerja.

2. Bidang Praktis

a. Bagi Pelaku Ekonomi, Lembaga Pemerintah atau Swasta

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas pengetahuan pada sektor moneter dengan metode data panel.

c. Bagi Akademik dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Ketimpangan Pendapatan, UMK, dan Kesempatan Kerja.